

# SIKAP POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI SURAKARTA TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG

Sudarno Shobron, Muhammad Anis Sumaji

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, Indonesia

Email: ss175@ums.ac.id

*Abstrak*-Sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah menetapkan proses pemilihan Presiden dengan cara pemilihan langsung. Hal tersebut menjadi proses yang sarat dengan berbagai kepentingan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah para elit di dua organisasi masa terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Elit Muhammadiyah dan NU khususnya di Surakarta pada era ini masuk pada pusaran politik praktis yang deras sehingga terjadilah benturan hebat antara kepentingan elit Muhammadiyah dan NU dengan kebijakan organisasi yang tidak berpolitik praktis. Penelitian deskripsi analitik ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang pemilihan Presiden secara langsung. Metode yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif yang pengambilan datanya dengan cara wawancara dan dokumen yang mendukung penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta dan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta. Sikap politik para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama terbagi menjadi tiga varian, *pertama*, sikap moderat idealistik yang orientasi sikapnya menuju pada Islam ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, *Kedua*, Sikap realistik-kritis yang melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. *Ketiga*, Sikap akomodatif-pragmatis yang meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan. Perbedaan dan persamaan sikap para elit diidentifikasi secara komparatif sehingga jelas elit yang setuju dan tidak setuju terhadap pemilihan Presiden secara langsung.

**Kata kunci:** elit, sikap, surakarta, pemilihan.

## I. PENDAHULUAN

Warna politik di tubuh Muhammadiyah dan NU melekat dalam laju gerakan organisasinya. Hal ini juga berimbas pada elit Muhammadiyah dan NU baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah termasuk di Surakarta. Kegundahan dan sikap elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta khususnya pada proses pemilihan presiden secara langsung menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan pola gerakan organisasi yang sama-sama mengusung gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta berlepas diri dari politik praktis, akan tetapi terdapat kebebasan bagi elit Muhammadiyah dan NU untuk berperan secara individu pada tataran politik praktis sehingga menimbulkan sikap yang beragam.

Ada dua alasan mengapa tema ini penting untuk dikaji. *Pertama*, berbicara tentang sikap politik di kalangan Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta belum terlalu banyak. Pada kenyataannya, sikap politik elit Muhammadiyah di Surakarta tidaklah tunggal, melainkan plural.<sup>1</sup>

Elit NU di Surakarta mempunyai sikap politis yang sama khususnya pada pemilihan presiden secara langsung. Setelah era Reformasi dimulai, banyak para elit penting dari Muhammadiyah dan NU berbondong-bondong memasuki dunia politik. Bahkan, pada era ini sebagian besar elit dua organisasi ini bahkan juga mendorong untuk dibentuknya partai politik yang menjadi representasi dari organisasi massa Islam yang mereka anut. Oleh sebab itu, lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai akibat dari dorongan para tokoh Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai akibat dari dorongan para tokoh NU. Kelahiran PAN dan PKB tentu berimbas pada sikap politik elit Muhammadiyah dan NU tidak hanya di tataran pengurus pusat akan tetapi juga pada sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta.

*Kedua*, *Power sharing* yang terjadi pada Muhammadiyah dan NU tidak terpusat melainkan tersebar merata sehingga menyebabkan sikap politik elitnya yang variatif. Karena itu, studi ini ingin menggambarkan apakah sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta masih mempunyai korelasi yang erat dengan model kepemimpinan yang kolektif-kolegial khususnya pada pemilihan presiden secara langsung.

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pemilihan presiden secara langsung yang sudah terlaksana pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Tahun 2004 menjadi momentum yang sangat penting ketika terjadi peralihan dari model pemilihan presiden melalui system voting anggota MPR berganti menjadi pemilihan presiden secara langsung yang membutuhkan tingkat partisipasi tinggi rakyat Indonesia termasuk dalam hal ini adalah para Elit Muhammadiyah dan NU khususnya di Surakarta. Selanjutnya, tempat penelitian yang dipilih adalah kota Surakarta. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Surakarta menjadi barometer sosiopolitik nasional dan juga merupakan miniatur Indonesia karena penduduknya yang multi idiologis.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah ; Over crossing Jawa Sentris*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 139.

<sup>2</sup> Suara Merdeka, Fokus Jateng, 7 Juli 2014.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pemilihan Presiden secara langsung merupakan penelitian metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menjelaskan secara komprehensif sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung sehingga didapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah terpublikasikan di masyarakat umum.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yaitu upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Pada awalnya, pendekatan fenomenologis adalah kajian filsafat dan sosial. Penggagas utamanya Edmund Husserl yang menginginkan fenomenologi dapat melahirkan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fenomenologi kemudian berkembang sebagai metode riset yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk di dalamnya komunikasi sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, pertama, metode dokumentasi yaitu setiap bahan baik yang tertulis maupun film.<sup>4</sup> Metode ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan dan mencatat karya-karya elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta yang pernah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, makalah, maupun di media cetak lainnya. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan karya-karya dari para ilmuwan yang pernah membahas tentang pemikiran dan sikap elit yang dimaksudkan dalam penelitian ini serta arsip, surat keputusan, dan dokumen-dokumen penting yang dianggap memiliki relevansinya dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

Kedua, metode wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif kontemporer yang belum pernah dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Ada empat tahapan penting yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu ; (1) menentukan siapa yang akan diwawancarai, (2) mendapatkan akses dan mengatur proses wawancara, (3) melakukan wawancara, dan (4) menganalisis hasil wawancara.<sup>6</sup>

Semua data yang sudah terkumpul baik berupa hasil wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi dari buku, jurnal, media massa, dokumen, dan arsip lainnya, ditelaah secara detail dengan menggunakan tiga tahapan yaitu: pertama, reduksi data berupa pemilihan dan pemilihan

data yang sudah terkumpul secara cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung. Kedua, penyajian data berupa penyajian data penelitian secara deskriptif dan detail sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, interpretasi data yakni analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan sesuai dengan metode yang berlaku, lalu diuji validitasnya, sehingga mendapatkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulan.

Analisa data Induksi penelitian ini digunakan untuk melihat perjalanan pemikiran politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta. Sedangkan komparasi menganalisis hubungan antara pemikiran politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta khususnya melakukan analisa terhadap adanya perbedaan dan persamaannya tentang pemilihan Presiden secara langsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pemilihan Presiden secara langsung

Data yang sangat mendukung terhadap proses analisa untuk mengklasifikasi sikap politik para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang pemilihan Presiden secara langsung melalui wawancara yang dilaksanakan dengan para pengurus sebagai elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta serta didukung dengan data-data penunjang lainnya seperti dokumen yang ada baik di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta maupun di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta. Berdasarkan pada analisa terhadap sikap para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tersebut ditemukan tiga varian sikap yaitu:

#### 1. Sikap Moderat-Idealistik

Sikap moderat-idealistik merupakan gabungan dari dua sikap yang menyatu dalam diri para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta. Sikap ini memiliki ciri-ciri antara lain, orientasi sikapnya menuju pada Islam cita-cita yakni Islam yang ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, orientasi sikapnya juga menyetujui adanya kontekstualisasi ajaran Islam tetapi dibatasi dengan syarat-syarat khusus serta dapat menghargai perbedaan yang muncul di masyarakat sebagai sebuah fitrah manusia serta ada keinginan menarik Islam sejarah pada islam cita-cita. Elit yang tergabung dalam kelompok ini adalah M. Najmuddin Zuhdi, Anwar Sholeh, Hilmi Ahmad Saakdillah, Kyai Shofwan Fauzi dan Martanto.

Hilmi Ahmad Saakdillah mensikapi pemilihan presiden secara langsung sebagai sebuah sistem pemilihan kepala negara yang sudah layak untuk diterapkan di Indonesia. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta ini menyatakan bahwa sudah saatnya rakyat memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan keterbukaan kriteria. Rakyat dihadapkan pada

<sup>3</sup> O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktek Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Meditor, Vol. 9, No. 1, tahun 2008, hlm. 164.

<sup>4</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 216.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>6</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 104.

kebebasan untuk memilih serta menggunakan hak pilihnya dan sangat disayangkan bila ada warga negara yang tidak memberikan suaranya. Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Najmuddin Zuhdi. Najmuddin yang juga sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid yang membidangi fatwa-fatwa di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta ini menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung pada hakikatnya membuka wawasan rakyat tentang pentingnya demokrasi di Indonesia serta pentingnya partisipasi aktif rakyat terutama kaum Islam dalam berpolitik sehingga rakyat semakin cerdas dalam mensikapi proses demokrasi seperti pemilihan anggota legislative dan pemilihan presiden secara langsung.

Martanto yang menjadi Sekretaris Tandfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta juga menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung membuka kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan rakyat, sehingga siapapun yang terpilih menjadi Presiden maka itulah Kepala Negara pilihan rakyat. Martanto juga menyayangkan apabila ada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Bahkan pimpinan PBNU menginstruksikan kepada seluruh warga NU untuk tidak golput dan wajib menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

## 2. Sikap Realistik-Kritis

Sikap realistik-kritis mempunyai ciri-ciri antara lain melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. Menghadirkan Islam yang universal secara realistis dalam keragaman dan kemajemukan, serta dimungkinkan adanya proses islamisasi dan akulturasi dengan budaya lokal agar Islam tetap diterima sehingga terjadi keragaman dan manifestasi Islam, walaupun semua didasarkan pada keutuhan ajaran Islam. Para elit yang tergabung pada kelompok ini adalah Subari, Teguh, Joko Riyanto, Khoeron, Khusairi dan Suwardi Syaifuddin Noer.

Teguh yang menjadi Guru SMA I Surakarta dan pernah menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta periode 2005-2010 sangat memahami bagaimana corak keragaman sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Teguh lebih setuju apabila pemilihan Presiden dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPR/MPR sebagai perwujudan wakil rakyat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Joko Riyanto yang menjadi Ketua Pedagang Pasar Legi Surakarta. Joko menyampaikan bahwa dia lebih setuju pemilihan Presiden tidak dilakukan secara langsung akan tetapi cukup melalui pemilihan yang dilakukan oleh

wakil rakyat karena dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat tinggi seperti biaya yang semestinya bisa untuk kesejahteraan rakyat dipakai untuk proses pemilihan Presiden secara langsung.

Khoeron yang masih menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta periode 2010-2015 juga menyatakan bahwa pemilihan Presiden secara Langsung justru membuka tingginya angka golput di masyarakat karena tingkat partisipasi rakyat yang rendah. Khoeron mencontohkan adanya penurunan angka partisipasi warga di lingkungan tempat tinggalnya pada saat pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2009 dengan pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2014.

Elit Nahdlatul Ulama Kota Surakarta, Khusairi dan Suwardi Syaifuddin Noer menyatakan sikapnya lebih setuju pada pemilihan Presiden secara langsung dengan berbagai kelebihanannya. Suwardi yang menjadi wakil Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta bahkan menyatakan bahwa model pemilihan Presiden secara langsung yang diterapkan di Indonesia sudah diakui dunia sebagai wujud demokrasi yang paling bagus dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

## 3. Sikap Akomodatif-Pragmatis

Sikap akomodatif-pragmatis merupakan sikap yang mempunyai ciri-ciri antara lain, meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan, atau setidaknya berpihak pada apa yang sesuai dengan kehendaknya. Sikap mencari basis legitimasi untuk memperkuat bargaining position dengan pihak kompetitor (untuk tidak mengatakan pihak lawan), dan sikap yang tidak konsisten dalam merespon berbagai realitas yang berkembang. Karena itu, segala hal yang bersifat ideologis tidak begitu diperhitungkan oleh kelompok ini. Sikap yang demikian dapat kita lihat pada sosok Mas Ahmad Dimiyati, Muhar Abdurrahman, Muhammad Mashuri, Hari Mas'udi dan Umar Kardjani.

Muhar Abdurrahman sebagai Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta menyatakan bahwa pemilihan Presiden secara langsung sudah ditetapkan oleh negara dan sudah dibuat Undang-undangnya, oleh karena itu sebagai warga negara yang baik tinggal mengikuti saja serta berpartisipasi untuk mensukseskannya. Senada dengan Muhar Abdurrahman, Mas Ahmad Dimiyati yang juga sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Surakarta menyatakan bahwa sebagai warga negara kita harus ikut aturan yang sudah ditetapkan, walaupun banyak yang menilai bahwa pemilihan presiden secara langsung mempunyai dampak negatif yang luas. Pada

kesempatan yang lain Umar Kardjani mencontohkan model pemilihan kepala negara sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Konteks pemilih yang ada di forum pemilihan kepala negara itu haruslah orang-orang yang mempunyai kapabilitas, kecakapan, serta berkualitas sehingga hasil pilihannya juga kepala negara yang cakap, mempunyai kapabilitas dan berkualitas. Berbeda dengan model pemilihan Presiden secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia dengan sistem one man one vote. Sistem tersebut pada akhirnya membuka kesempatan terjadinya politik uang, serta menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.

Hari Mas'udi, Wakil Ketua Tanfidziah PCNU bersikap setuju dengan model pemilihan melalui anggota DPR/MPR, akan tetapi para wakil rakyat tersebut harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut belum terlihat sampai sekarang karena ternyata banyak anggota legislatif yang tersangkut masalah korupsi. Oleh karenanya Hari juga mendukung pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung karena pada saat sekarang ini yang paling tepat untuk diterapkan adalah model pemilihan Presiden secara langsung. Sistem tersebut bisa jadi akan berubah seiring perubahan pemikiran dan kultur di masyarakat serta situasi politik di Indonesia.

Uraian tentang pengelompokan sikap para elit Muhammadiyah dan NU menunjukkan bahwa para elit baik di Muhammadiyah maupun NU terdiaspora cukup beragam. Sikap dan pemikiran para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tergolong cukup dinamis, progresif, dan tidak statis, sehingga antara satu sikap dengan sikap yang lainnya bisa saling mengimbangi. Sikap yang ditunjukkan oleh elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tidak ada kecenderungan mengarah pada sikap formalistik maupun sikap totalistik. Semua elit berada pada sikap moderat dan sikap inklusif dengan stressing yang berbeda di masing-masing sikapnya. Karena itu, di tengah beragamnya sikap elit Islam di Surakarta dalam merespon berbagai dinamika seputar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, peran elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta harus dioptimalkan untuk mengontrol dan menjaga stabilitas demokrasi dan masa depan perkembangan politik Indonesia pasca era Reformasi sehingga hal tersebut menjadi kontribusi positif untuk tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat Surakarta yang multietnis dan multiras.

Tabel I Varian Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung

Sikap Politik	Nama Elit	Karakteristik Sikapnya
Sikap	I. Anwar Sholeh	I. Orientasi sikapnya

Moderat-Idealistik	2. M. Najmuddin Zuhdi 3. Ahmad Hilmi Saakdillah 4. Martanto 5. Kyai Shofwan Fauzi	2. menuju pada Islam cita-cita yakni Islam yang ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Orientasi sikapnya menyetujui adanya kontekstualisasi ajaran Islam tetapi dibatasi dengan syarat-syarat khusus. 3. Dapat menghargai perbedaan yang muncul di masyarakat sebagai sebuah fitrah manusia. 4. Ada keinginan menarik Islam sejarah pada islam cita-cita.
Sikap Realistik-Kritis	1. Subari 2. Teguh 3. Joko Riyanto 4. Khoeron 5. Khusairi 6. Suwardi Syaifuddin Noer.	1. Melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama dengan konteks sosial masyarakat. 2. Menghadirkan Islam yang universal secara realistis dalam keragaman dan kemajemukan. 3. Dimungkinkan adanya proses islamisasi dan akulturasi dengan budaya lokal agar Islam tetap diterima sehingga terjadi keragaman dana manifestasi Islam
Sikap Akomodatif-Pragmatis	1. Mas Ahmad Dimiyati 2. Muhar Abdurrahman 3. Muhammad Mashuri 4. Hari Mas'udi 5. Umar Kardjani	1. Meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan atau setidaknya berpihak pada apa yang sesuai dengan kehendaknya. 2. Sikap mencari basis legitimasi untuk memperkuat bargaining position dengan pihak kompetitor (untuk tidak mengatakan pihak lawan). 3. Sikap yang tidak konsisten dalam merespon berbagai realitas yang berkembang. 4. Segala hal yang bersifat ideologis tidak begitu diperhitungkan oleh kelompok ini.

B. Persamaan dan Perbedaan sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pemilihan Presiden secara langsung

Elit Muhammadiyah memandang kekuasaan politik sebagai lapangan perjuangan strategis dan alat yang paling efektif untuk transformasi nilai otoritatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi politik tidak diabaikan oleh Muhammadiyah karena Islam yang menjadi rujukan gerakan ini juga memandang

seluruh aspek kehidupan seperti halnya politik tidak terbebas dari ketentuan syariat.<sup>7</sup> Inilah salah satu hal yang melatarbelakangi Muhammadiyah membuat kebijakan tidak berpolitik praktis, walaupun kemudian pada perjalanannya banyak pula elit Muhammadiyah secara pribadi terlibat politik praktis. Pada sisi yang lain, elit NU memandang kekuasaan politik merupakan salah satu jalan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengembangkan sayap pergerakan. Meski sesungguhnya NU secara organisasi telah menetapkan kebijakan tidak berpolitik praktis dengan bercermin pada sejarah NU yang pernah menjadi partai politik.<sup>8</sup>

#### 1. Persamaan Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta

Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta mempunyai persamaan dan perbedaan sikap politik tentang Pemilihan Presiden secara langsung. Persamaan antara elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta meliputi aspek sikap dukungan terhadap pemilihan Presiden secara langsung.

elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta mempunyai persamaan sikap mendukung pemilihan Presiden secara Langsung. Sistem pemilihan Presiden yang diterapkan sebelum tahun 2004 melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPR/MPR sebagai perwakilan rakyat dianggap telah memenuhi unsur kesesuaian dengan sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dianggap telah memenuhi aspirasi rakyat yang dapat memilih secara langsung calon kepala negara. Pada sisi yang lain, elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta mempunyai sikap yang sama mendukung terselenggaranya proses pemilihan Presiden secara langsung. Dukungan tersebut berupa hadir di Tempat Pemungutan Suara dan mengajak masyarakat untuk aktif memberikan suaranya di tempat pemungutan suara.

Tabel 2

Persamaan Sikap Elit Muhammadiyah dan NU di Kota Surakarta dalam Pemilihan Presiden secara langsung

NO	Aspek	Elit Muhammadiyah	Elit NU
I	Sikap Mendukung untuk mensukseskan	Bersikap aktif	Bersikap aktif

#### 2. Perbedaan Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta

Adanya persamaan di kalangan elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta juga menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi aspek persetujuan terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sebagian besar Elit Muhammadiyah bersikap tidak setuju terhadap sistem pemilihan Presiden secara langsung. Ada dua alasan yang dikemukakan yakni: 1) tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan 2) perhitungan suara tidak proporsional karena suara seorang yang mempunyai intelektual tinggi disamakan dengan orang yang mempunyai intelektual rendah, begitu pula suara orang yang sholeh disamakan dengan penjahat. Walaupun para elit Muhammadiyah di Surakarta menunjukkan sikap tidak mendukung pemilihan Presiden secara langsung akan tetap dalam pelaksanaannya para elit tersebut tetap berpartisipasi aktif karena memandang keaktifan tersebut sebagai wujud loyalitas terhadap negara.

Elit NU di Surakarta menunjukkan sikap dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung. Menurut elit NU, pemilihan Presiden secara langsung menunjukkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik sebagai warga negara. Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden yang dilakukan oleh anggota DPR/MPR yang berpotensi menyuburkan kolusi sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde baru.

Tabel 3

Perbedaan Sikap Elit Muhammadiyah dan NU di Kota Surakarta dalam Pemilihan Presiden secara langsung

NO	Aspek	Elit Muhammadiyah	Elit NU
I	Sikap Setuju Sistem Pemilihan Presiden secara Langsung	Sebagian besar tidak setuju, sebagian kecil yang setuju karena sistem sudah dilaksanakan	Semua setuju

#### IV. KESIMPULAN

Sikap politik elite Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang pemilihan Presiden secara langsung dikelompokkan pada tiga varian sikap yakni: *pertama*, sikap moderat idealistik yang memiliki ciri-ciri antara lain, orientasi sikapnya menuju pada Islam cita-cita yakni Islam yang ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, *Kedua*, Sikap realistik-kritis mempunyai ciri-ciri antara lain melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. *Ketiga*, Sikap akomodatif-pragmatis merupakan sikap yang mempunyai ciri-ciri antara lain, meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan.

<sup>7</sup> Sayrifuddin Jurdi, *Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elit Lokal Muhammadiyah sesudah Orde Baru* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 103.

<sup>8</sup> Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 117.

Adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, sampel yang lebih banyak dan menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks seperti eksperimen, etnografi dan lainnya.

<http://bahankuliah.wordpress.com/2009/05/14/penulisan-kajian-pustaka/>, diakses 2 Oktober 2015, pukul 10.08 WIB.

[http://www.kompasiana.com/boykepribadi/therulingelite\\_54f76467a33311d2338b47f5](http://www.kompasiana.com/boykepribadi/therulingelite_54f76467a33311d2338b47f5), diakses Kamis 8 Oktober 2015.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alfian, M. Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Asyari, Suaidi. 2009. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah ; Over crossing Jawa Sentris*. Yogyakarta : LKiS.
- Burger, D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bharata.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Houben, Vincent J.H. 2002. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang.
- Ismanto, Ign. 2004. *Pemilihan Presiden secara Langsung 2004, Dokumentasi, Analisa dan Kritik*. Jakarta: Galang Press Group.
- Jurdi, Syarifuddin. 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. Yogyakarta: GAMA Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo, 2004. *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak.
- Larson, George D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2002. *Theory and Methods in Political Science*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nashir, Haedar. 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Putnam, Robert D. 2001. *Studi Perbandingan Elit Politik dalam Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews. Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: GAMA Press.
- Shobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sutjipto, F.A. t.t. *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, Seri Bacaan Sejarah Indonesia, No. 11.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suara Merdeka, Fokus Jateng, 7 Juli 2014.